



Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kediri

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia, dan hidayahNya, sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas 2021 - 2026 Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dapat kami selesaikan dengan baik.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan bidang Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri untuk kurun waktu tahun 2021-2026, dengan penekanan pada pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Kediri.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri ini memberikan informasi kepada berbagai pihak terkait tentang program kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri lima tahun kedepan, juga diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah pembangunan di Kabupaten Kediri.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri ini. Saran, masukan, dan kritik sangat diharapkan untuk penyempurnaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri ini umumnya untuk peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri ke depannya agar bisa terus memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Kediri.

Kediri, 24 September 2021

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika

Kabupaten Kediri



IBNU IMAD, S.Sos
NIP. 19721010 200501 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	6
2.2 Sumber Daya Dinas	12
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas	13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS	26
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	26
3.2 Telaahan VisiMisi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	27
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Telaahan.....	28
3.4 Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup	30
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis.....	31
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	33
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	34
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	36
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	44
BAB VIII PENUTUP	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra merupakan instrumen untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode rencana jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu institusi pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Renstra ini dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Sebagai dokumen perencanaan, dokumen Renstra mempunyai arti dan fungsi yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan lima tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renstra menjadi acuan untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang
2. Renstra adalah dokumen acuan untuk mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai, dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas
3. Renstra berfungsi sebagai alat atau media untuk berkoordinasi dengan pihak lain, selain itu juga untuk mempermudah pencapaian target, strategi dan penggunaan sumber daya yang ada

Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Secara lebih rinci proses penyusunan Renstra meliputi tahapan : (a) Persiapan penyusunan Renstra; (b) Penyusunan rancangan Renstra; (c) Penyusunan rancangan akhir Renstra; dan (d) Penetapan Renstra. Pada proses penyusunan Rancangan Renstra mencakup antara lain: pengolahan data dan informasi; analisis gambaran pelayanan

Perangkat Daerah; review Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan provinsi; penelaahan dan analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); perumusan isu strategis; serta perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun.

Demikian halnya dengan dokumen Renstra sebagai salah satu komponen dokumen perencanaan pembangunan daerah. Keterkaitan dimaksud meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan RPJMD. Sehingga tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program dalam rencanakerja indikatif pada RPJMD. Oleh sebab itu prinsip yang mendasari penyusunan Rencana Strategis Dinas Kominfo Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 ini adalah sebagai rencana operasional untuk pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026 di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Dinas Kominfo Kabupaten Kediri mendukung visi pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Birokrasi yang Melayani” melalui misi ke-2 yakni “Reformasi birokrasi dan pelayanan publik”. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, tujuan yang hendak dicapai oleh Kabupaten Kediri adalah “Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik”, sedangkan tujuan Dinas Kominfo adalah sasaran Kabupaten Kediri dalam Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik yaitu “Transformasi Digital Penyelenggaraan Pelayanan publik dengan indikator sasaran Indeks SPBE .

Berdasarkan pemetaan misi di Kabupaten Kediri sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2021-2026, salah satu isu strategis pembangunan Kabupaten Kediri adalah “Reformasi dan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan”. Reformasi tata kelola pemerintahan dapat diartikan sebagai upaya pembaharuan dan perubahan yang mendasar dalam tata kelola pemerintahan serta sistem penyelenggaraannya. Tujuan reformasi tersebut adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan akuntabel serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas. Pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan akan menyingkirkan ego sektoral setiap pihak sehingga terwujud kolaborasi kerja lintas OPD dalam mencapai tujuan dari pembangunan. Perubahan global yang saat ini terjadi menuntut transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih cepat dan efisien. Seiring dengan pesatnya laju perkembangan teknologi, tata kelola pemerintahan dituntut untuk segera berbenah dengan berbagai layanan digital. Digitalisasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan

akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Dinas Kominfo memiliki peran penting dalam menghadapi isu strategis Kabupaten Kediri tersebut. Isu Reformasi dan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan yang menjadi fokus pembangunan Kabupaten Kediri, diantaranya : perlunya percepatan implementasi Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), perlunya pemutakhiran infrastruktur IT, layanan informasi dan pengaduan publik.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 –2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Kediri memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Kominfo Kabupaten Kediri adalah :

1. Mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah dan Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah yang telah ditetapkan pada Peraturan daerah tentang RPJMD

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kominfo Kabupaten Kediri adalah :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kominfo untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah dan Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan pada Peraturan daerah tentang RPJMD
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Kominfo

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Kominfo Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu- Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 51 Tahun 2016, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, urusan Pemerintahan di bidang Persandian dan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Statistik. Tugas, fungsi, dan struktur Organisasi Dinas Kominfo Kabupaten Kediri bisa dijabarkan sebagai berikut :

1. Susunan Organisasi Dinas Kominfo Kabupaten Kediri

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan dibantu oleh seorang Sekretaris, empat Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, dan Kepala Seksi, dan kelompok Pejabat Fungsional yang dijabarkan sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Penyusunan Program

c. Bidang Bidang Pengelolaan Informasi Publik membawahi :

1. Seksi Penyelenggaraan dan Pemantauan Informasi Publik
2. Seksi Analisa dan Penyebaran Informasi Publik
3. Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

d. Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi membawahi :

1. Seksi Pelayanan Komunikasi Publik
2. Seksi Kehumasan
3. Seksi Pemberdayaan Komunikasi Publik dan Akses Informasi

e. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi membawahi :

1. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi
2. Seksi Sandi dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi
3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi

f. Bidang E-Government

1. Seksi Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen
2. Seksi Tata Kelola Layanan E-Government dan Sistem Informasi
3. Seksi Statistik dan Data Elektronik
4. Kelompok Jabatan Fungsional : Juru Kominfo.

2. Tugas dan Fungsi

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kediri bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kediri mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- 2) Penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- 3) Pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistic
- 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistic
- 5) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- 6) Pembinaan penyelenggaraan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistic
- 7) Pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- 8) Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan

b. Sekretaris Dinas

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan rancangan kebijakan dinas
- 2) penyusunan program dan pelaporan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evalnasi kegiatan dinas
- 3) pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan

- 4) pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistic
- 5) pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan
- 6) pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja
- 7) pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan dinas
- 8) penyusunan profil dinas
- 9) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dinas

c. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pen5rusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebiijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten
- 2) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten
- 3) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten
- 4) pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Pengelolaan Informasi Publik.

d. Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten.

Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan

hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi - publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten

- 2) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, supervisi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten
- 3) pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi

e. Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, pemeliharaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi, serta keamanan informasi dan telekomunikasi Kabupaten.

Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan teknologi, integrasi sistem informasi, serta keamanan informasi dan telekomunikasi di Kabupaten
- 2) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang infrastruktur dan teknologi, integrasi sistem informasi, serta keamanan informasi dan telekomunikasi di Kabupaten
- 3) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi, integrasi sistem informasi, serta keamanan informasi dan telekomunikasi di Kabupaten
- 4) pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

f. Kepala Bidang E-Government

Mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, pemeliharaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi, serta keamanan informasi dan telekomunikasi Kabupaten.

Kepala Bidang E-Government menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria bimbingan teknis dan pelaporan di bidang pengembangan aplikasi sistem informasi, pengembangan ekosistem E-Government, serta tata kelola E-Government, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi, pengolahan dan penyajian data serta melakukan penghimpunan data statistik pembangunan daerah dan pengolahan data elektronik di Kabupaten

- 2) pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi pedesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya
- 3) pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi telekomunikasi
- 4) pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang EGovernment

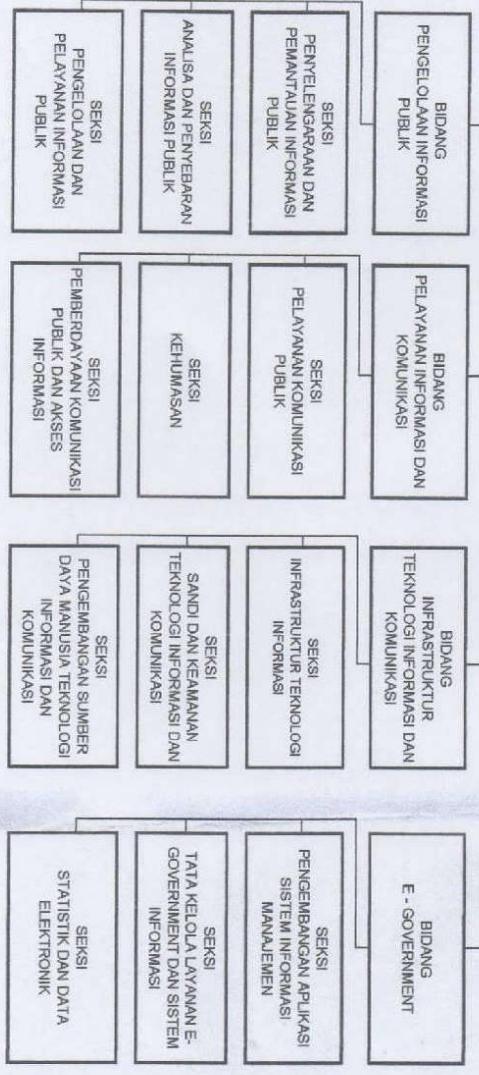
**BAGAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

- SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
- SUB BAGIAN KEUANGAN
- SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Pemerintah Kabupaten Kediri
 Sekretariat Daerah
 Asisten Administrasi Umum
 dan Sekretaris Daerah
 Kabupaten Kediri
 H. STRIGOLI, SE, MM
 Bupati Kediri
 NIP. 198703071990031006

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KEDIRI
 NOMOR : 51 TAHUN 2016
 TANGGAL : 9 - 11 - 2016

BUPATI KEDIRI,
 H
 HARYANTI SUTRISNO

2.2. Sumber Daya Dinas Kominfo

a. Sumber Daya Manusia

Dinas Komunikasi dan Informatika beralamat di Jl. Sekartaji no. 2 Desa Doko Kec. Ngasem Kabupaten Kediri. Sumber daya manusia pada Dinas Komunikasi dan Informatika secara keseluruhannya berjumlah 76 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 3 orang Kasubag, 2 orang Kepala Bidang, 8 orang Kepala Seksi dan didukung oleh 62 orang staf. Staf tersebut terdiri dari 28 orang PNS dan 34 non PNS.

Tabel 2.1 Daftar Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

Komponen		Jumlah Pegawai
Jenis Kelamin	Laki-laki	30
	Perempuan	12
	Jumlah	42
Gol/Ruang	IV-a	7
	III-d	11
	III-c	5
	III-b	4
	III-a	7
	II-d	
	II-c	6
	II-b	2
	II-a	
	Jumlah	42
Ijazah Terakhir	S2	9
	S1	18
	DI/DIII	7
	SMA	8
	Jumlah	42

b. Sarana Prasarana

Tabel 2.2 Daftar Sarana Prasarana

NO.	JENIS	JUMLAH	KET
1.	Kendaraan Roda 2	13 unit	
2.	Kendaraan Roda 4	4 unit	
3.	Mesin Ketik	7 unit	
4.	Lemari	19 unit	
5.	Filling Kabinet	11 unit	
6.	Komputer Mainframe/Server	13 unit	
7.	Komputer Personal (PC)	49 unit	
8.	Notebook/Laptop	18 unit	
9.	Printer	24 unit	
10.	Scaner	2 unit	
11.	Monitor/LCD	1 unit	
12.	CPU	1 unit	
13.	Peralatan Jaringan Komputer	82 unit	
14.	Kamera	24 unit	
15.	Alat studio	79 unit	

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo

Dalam kinerja pelayanannya, Dinas Kominfo mengampu tiga urusan yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian, dan urusan statistik.

Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan informatika pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan akses dan kemudahan masyarakat berkomunikasi dan mendapatkan informasi di semua wilayah Kabupaten Kediri dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Hal tersebut diwujudkan dengan sasaran terwujudnya peningkatan akses, pelayanan dan kemudahan masyarakat untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Keberadaan komunikasi dan informatika ini dibutuhkan oleh seluruh pihak, seperti pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

Tabel 2.3 Perkembangan Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Kediri, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Website milik pemerintah daerah (situs)	1	1	1	1	1
Kecukupan SDM di bidang TIK (%)	80,00	80,00	81,00	100,00	100,00
Ruang publik yang terlayani <i>free wifi</i> (%)	94,50	95,00	95,00	95,00	95,00
Penyebaran informasi, komunikasi dan media massa melalui kerja sama (%)	80,00	98,00	120,00	112,00	100,00
Jumlah hasil-hasil pembangunan daerah yang terpublikasi		480	822	730	785
PPID aktif pada SKPD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SKPD yang berbasis <i>e-government</i> (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tingkat kecepatan konektivitas jaringan internet Pemkab	409 Mbps	410 Mbps	510 Mbps	510 Mbps	510 Mbps
Jumlah <i>update</i> pada media pemerintah daerah	4x/hr	4x/hr	7x/hr	10x/hr	10x/hr
Jumlah pengunjung website resmi milik Pemkab	1,6jt	8jt	13,3jt	15,6jt	18,6jt
Jumlah Sistem Informasi Pemerintah Daerah	2	3	12	14	14

Persandian

Urusan persandian dilaksanakan sebagai salah satu program kerja yang salah satunya adalah untuk meningkatkan layanan komunikasi dan informatika. Di Kabupaten Kediri, urusan persandian memiliki beberapa tugas dan fungsi: layanan monitoring trafik elektronik, layanan penanganan insiden keamanan teknologi informasi dan komunikasi, serta mengelola berita sandi yang diterima dari pusat, provinsi, maupun daerah lain.

Sebagai penyedia layanan komunikasi dan informatika, melalui urusan persandian, memerlukan kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan monitoring

trafik elektronik. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan adanya jaringan komputer, yaitu membentuk sistem yang terdiri dari komputer yang didesain untuk berkomunikasi dan mengakses informasi melalui laman situs. Untuk mencapai layanan komunikasi dan akses informasi yang baik, maka monitoring trafik elektronik perlu dilakukan. Hal tersebut dimaksudkan untuk melihat trafik pada sebuah jaringan yang memberikan laporan berdasarkan trafik jaringan elektronik. Setelah mengetahui keadaan trafik elektronik, maka pemerintah daerah dapat mengambil strategi pelaksanaan program kerja yang berkaitan dengan pelayanan komunikasi dan informatika.

Selain melakukan monitoring trafik elektronik, pemerintah daerah juga menjalankan fungsi layanan penanganan insiden keamanan teknologi informasi dan komunikasi melalui urusan persandian. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan penyampaian informasi dan komunikasi yang aman dan mudah bagi masyarakat. Di samping itu, terdapat pula fungsi pengelolaan berita sandi, baik berita sandi yang diterima oleh pemerintah daerah dari pusat, provinsi, maupun daerah lain. Hal tersebut menjamin keamanan penyampaian informasi dan memastikan informasi diterima oleh perangkat daerah yang terkait sehingga informasi dan komunikasi dapat dilaksanakan dengan lancar.

Statistik

Dalam pencatatan statistik, Pemerintah Kabupaten Kediri bekerja sama dengan BPS Kabupaten Kediri untuk merangkum berbagai statistik Kabupaten Kediri yang merupakan indikator atau tolok ukur yang digunakan untuk menggambarkan kelengkapan urusan statistik yang tersedia oleh Kabupaten Kediri. Jenis dokumen yang dapat menjadi indikator urusan statistik antara lain buku Kabupaten Kediri Dalam Angka buku PDRB Kabupaten Kediri. Buku Kabupaten Kediri Dalam Angka pada dasarnya berisi dengan rangkuman statistik mengenai geografi dan iklim, pemerintahan, penduduk dan tenaga kerja, sosial, pertanian, perindustrian, pertambangan, energi, perdagangan, transportasi, komunikasi, pariwisata, keuangan daerah, dan pendapatan regional setiap tahun. Terkait dengan aktivitas ekonomi, pemerintah Kabupaten Kediri juga menyediakan buku PDRB Kabupaten Kediri menurut lapangan usaha maupun pengeluaran. Dalam versi yang lebih ringkas, Pemerintah Kabupaten Kediri juga menyediakan Buku Statistik Daerah sebagai bahan acuan perencanaan pembangunan.

Tabel 2.4 Persentase Publikasi Data Statistik di Kabupaten Kediri, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Publikasi data statistik (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kediri
Tahun 2016-2020

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Jumlah Ruang Publik yang Terlayani Free Wifi					21	21	21	21		10	20	20	20		47	95	95	95
2.	Jumlah Sistem Informasi Pemerintah Daerah					3	4	4	4		3	12	14	14		100	300	350	350
3.	Persentase SKPD yang berbasis e-government					100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100	100	100	100
4.	Tingkat kecepatan konektivitas jaringan internet Pemkab					410Mbps	410Mbps	1 Gbps	1 Gbps		410Mbps	510 Mbps	510 Mbps	510 Mbps		100	124	51	51
5.	Persentase PPID aktif pada SKPD					100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100	100	100	100
6.	Jumlah hasil-hasil pembangunan daerah yang terpublikasi					350/thn	480/thn	500/thn	600/thn		350/thn	822/thn	730/thn	785/thn		100	171	146	130
7.	Jumlah update pada media pemerintah daerah					4x/hari	4x/hari	10x/hari	10x/hari		4x/hari	7x/hari	10x/hari	10x/hari		100	175	100	100
8.	Jumlah pengunjung website resmi milik Pemkab (content viewer)					20jt/thn	20jt/thn	20jt/thn	20jt/thn		8jt/thn	13,3jt/thn	15,6jt/thn	18,6jt/thn		40	66,5	78	93

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kediri
Tahun 2016 – 2020

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.589.052.000	1.896.106.000	1.819.170.000	1.661.881.000		1.515.088.882	1.813.430.060	1.707.646.907	1.570.907.907		95,3%		93,8%	94,5%		
Penyediaan jasa surat menyurat		2.886.000	2.500.000				2.853.060	2.423.000				98,8%	96,9%				
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		124.000	200.400				119.716.980	164.018.354				96,5%	81,8%				
Penyediaan jasa administrasi keuangan		100.300.000	100.300.000				98.846.500	89.876.000				98,5%	89,6%				
Penyediaan jasa kebersihan kantor		53.040.000	62.640.000				48.017.150	60.928.764				90,5%	97,2%				
Penyediaan alat tulis kantor		49.076.000	40.600.000				45.545.500	36.492.500				92,8%	89,8%				
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		34.600.000	59.600.000				34.582.250	59.473.800				99,9%	99,7%				
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		370.940.000	535.000.000				370.940.000	529.402.500				100%	98,9%				
Penyediaan peralatan rumah tangga		12.635.000	20.000.000				12.553.900	19.987.500				99,3%	99,9%				
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		24.466.000	25.466.000	-	-		24.453.000	23.031.000				99,9%	90,4%				
Penyediaan makanan dan minuman		30.000.000	70.000.000	-	-		29.969.000	69.912.500				99,8%	99,8%				

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		244.78 0.000	318.39 0.000	-	-		244.77 9.119	318.38 7.295				99,9%					
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran		262.56 0.000	364.50 0.000	-	-		243.49 4.328	345.57 2.712				92,7%					
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah		195.57 9.000	36.800. 000	-	-		172.08 5.895	35.116. 371				87,9%					
Penyediaan Jasa Operasional		31.500. 000	1.500.0 00	-	-		31.500. 000	1.369.5 00				100%					
Penyediaan Jasa Administrasi Barang		8.650.0 00	11.150. 000	-	-		8.650.0 00	10.800. 000				100%					
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor		44.040. 000	47.260. 000	-	-		42.492. 200	46.638. 264				96,4%					
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran		-	-	1.378.4 25.000	1.427.9 65.000		-	-	1.298.8 38.074	1.353.7 61.513		-		94,2%	94,8 %		
Koordinasi dan konsultasi kelembagaan		-	-	440.74 5.000	233.91 6.000		-	-	408.80 8.833	217.14 6.394		-		92,7%	92,8 %		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		83.435. 000	1.001.5 60.000	942.25 0.000	300.85 6.665		80.512. 500	971.64 1.200	839.16 4.652	278.97 7.650		96,4%		97%	89%	92,7 %	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		35.000. 000	236.56 0.000				34.997. 500	228.03 6.000				99,9%		98%			
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		20.000. 000	135.00 0.000				18.396. 000	117.34 2.700				91,9%		96,3%			
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor		28.435. 000	45.000. 000				27.119. 000	44.554. 100				95,3%		86,9%			
pengadaan mebeleur		-	90.000. 000				-	88.350. 000					99%				

Rehabilitasi sedang/berat tempat parkir	-	495.00 0.000	224.00 0.000			-	493.35 8.400	215.62 5.600				99,6%	96,2%			
Penyediaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur	-	-	718.25 0.000	300.85 6.665		-	-	623.53 9.052	278.97 7.650				86,8%	92,7%		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20.640.000	20.640.000	35.640.000	19.640.000		16.113.000	15.855.800	12.848.600	4.524.300		78,0%			23%		
.Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	450000 0	4.500.0 00				450000 0	0				100%		0			
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5.180.0 00	5.180.0 00				5.159.0 00	5.012.0 00				99,5%		96,7%			
Penyusunan LAKIP	5.800.0 00	5.800.0 00				5.795.5 00	5.696.0 00				99,9%		98,2%			
Penyusunan Pelaporan Rencana Kerja	5.160.0 00	5.160.0 00				5.158.5 00	5.147.8 00				99,9%		99,7%			
Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD			35.640. 000	19.640. 000				35.640. 000	4.524.3 00				36%	23%		
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	10.000.000	80.110.000	678.800.000	184.000.000		8.750.000	69.173.000	649.586.856	177.781.500		99,2%			96,6%		
Publikasi Informasi Data Statistik Daerah	10.000. 000	42.858. 000	411.40 0.000	64.000. 000		8.750.0 00	32.598. 000	384.97 3.421	62.490. 000		87,5%		76%	93,5%	97,6%	
Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi		37.252. 000	267.40 0.000	120.00 0.000			36.575. 000	264.61 3.435	115.29 1.500		-			96%		
												98,1%	98,9%			

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		594.28 0.000	777.05 3.000	2.072.3 00.000	120.22 5.000		589.55 9.500	750.66 5.000	1.656.1 43.500	120.22 5.000		99,2%	96,6%	79,9%	100 %		
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi		205.61 0.000					205.61 0.000					100%					
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi		193.20 0.000	777.05 3.000	2.072.3 00.000	120.22 5.000		189.13 4.500	750.66 5.000	1.656.1 43.500	120.22 5.000		97,8%	96,6%	79,9%	100 %		
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi		26.600. 000					26.500. 000					99,6%					
Pembinaan dan Pengembangan Internet		168.87 0.000					168.31 5.000					99,6%					
Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi		156.35 0.000					106.35 0.000					68%					
Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi		100.00 0.000					50.000. 000					50%					
Pendampingan Telecenter		6.350.0 00					6.350.0 00					100%					
Pendampingan Telecenter		50.000. 000					50.000. 000					100%					
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi		624.60 9.000	2.549.8 85.000	5.316.6 44.500	372.08 0.000		600.18 4.000	2.485.3 04.250	5.217.8 46.200	218.61 8.800		96%	97,4%	98,1%	58,7 5%		
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi		75.000. 000	432.04 0.000	589.47 7.500	38.830. 000		74.300. 000	401.93 0.000	583.96 9.500	1.400.0 00		99%	93%	99%	3,60 %		
Sarasehan/Jumpa Pers		100.00 0.000					85.800. 000					85,8%					

Seminar Situasi Kondisi Kebijakan Pemerintah		75.000.000					72.900.000					97,2%					
Sinkronisasi Informasi dan Peningkatan SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi		200.840.000	300.000.000	795.260.000	110.830.000		199.290.000	296.540.000	789.075.600	72.181.000		99,2%	98,8%	99,2%	65,1%		
Workshop Teknologi Informasi dan Komunikasi		148.870.000					142.995.000					96%					
Monitoring dan Evaluasi Penembangan SDM Teknologi Informasi		6.029.000					6.029.000					100%					
Monitoring dan Evaluasi Penembangan SDM Teknologi Informasi		18.870.000					18.870.000					100%					
Peningkatan SDM Lembaga Non Pemerintah			408.190.000	405.345.000	63.020.000			377.225.000	391.420.000	3.400.000		-	92,4%	96,5%	5,39%		
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan			294.765.000	151.660.000	32.400.000			294.765.000	150.698.100	14.637.800		-	100%	99,3%	45,1%		
Penyebaran Informasi Isu Strategis di Kabupaten Kediri			1.114.890.000	3.374.902.000	127.000.000			1.114.844.250	3.302.683.000	127.000.000		-	99,9%	97,8%	100%		
Program kerjasama informasi dengan mas media		4.524.400.000	8.853.608.539	10.436.325.000	6.641.693.500		4.511.844.000	8.722.334.738	10.349.173.500	6.582.383.600		99,7%	98,5%	99,1%	99,1%		
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah		1.314.390.000	1.595.000.000				1.312.850.000	1.472.085.400				99,8%					
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah		63.000.000					63.000.000					100%					

Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat		64.550.000					64.520.000					99,9%					
Penyebarluasan Informasi melalui Pemutaran Film		15.000.000					15.000.000					100%					
Penyebarluasan Informasi melalui Peliputan Penerbitan Majalah		49.550.000					46.376.000					93,5%					
Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah di Tingkat Kabupaten		41.000.000					40.710.000					99,2%					
Peliputan Kegiatan Pembangunan di Kab.Kediri		77.360.000	174.360.000	163.700.000	178.700.000		76.645.000	174.308.950	159.240.000	134.770.000		99%	99,9%	97,2%	75,4%		
Pameran Teknologi Informasi		19.200.000					19.200.000					100%					
Penyebarluasan Informasi melalui Leflet/Brosur/Stiker /Spanduk Program-program Pemerintah		420.000.000					419.570.000					99,8%					
Persiapan Festival Pertunjukan Rakyat Pekan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)		30.750.000					30.750.000					100%					
Festival Pertunjukan Rakyat Pekan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)		49.250.000					49.250.000					100%					
Sarasehan /Coffee Morning		60.000.000					58.465.000					97,4%					
Pembinaan SDM ORARI dan RAPI		149.900.000					149.900.000					100%					
Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		2.100.000.000	2.727.972.539	4.379.290.000	1.952.218.500		2.099.978.000	2.725.556.500	4.360.943.500	1.915.138.600		99,9%	99,9%	99,5%	98,1%		

Penyebaran Informasi Isu Strategis di Kabupaten Kediri		70.450.000					65.630.000					93,1%					
Diseminasi Informasi Publik			3.502.475.000	4.830.970.000	4.480.175.000			3.497.410.500	4.824.000.000	4.474.875.000			99,8%	99,8%	99,8%		
Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan Informasi			853.801.000	1.062.365.000	57.600.000			852.973.388	1.004.990.000	57.600.000			99,9%	94,5%	100%		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informasi		6.238.380.000	2.083.640.000	3.758.174.500	1.184.000.000		5.867.790.124	1.899.519.795	3.519.059.468	1.078.825.007		94%	91,1%	93,6%	91,1%		
Layanan Jasa Bandwidth		3.007.060.000					2.998.610.324					99,7%	84,1%				
Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi		403.120.000	905.400.000	3.126.174.500	476.000.000		402.377.500	761.821.000	2.926.932.403	453.195.000		99,8%	85,2%	93,6%	95,2%		
Pengembangan Aplikasi Sistem Keamanan Teknologi Informasi		40.000.000	125.000.000	632.000.000	683.000.000		40.000.000	106.520.000	592.127.065	600.630.007		100%	97,9%	93,6%	87,9%		
Pemeliharaan Aplikasi E-Government		55.200.000					55.200.000					100%	91,1%				
Pembangunan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi		2.733.000.000	1.053.240.000		25.000.000		2.371.602.300	1.031.178.795		25.000.000		86,7%	84,1%		100%		
Program Pengembangan E-Government		37.814.500	4.153.370.000	4.183.845.927	2.812.373.000		37.124.250	4.096.477.030	3.958.021.000	2.747.104.500		98,1%	98,6%	94,6%	97,6%		
a. Pengelolaan Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah		13.000.000					12.409.750					95,4%					
b. Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi dan Aplikasi E-Government		3.014.500					3.014.500					100%					
c. Pengelolaan E-Government		21.800.000					21.700.000					99,5%					

d. Rekayasa aplikasi E-Government			339.00 0.000	104.00 0.000	1.000.0 00			334.76 5.930	100.36 5.000				98,7%	96,5%	0%		
Pengelolaan dan pemeliharaan layanan e-Government			2.654.9 00.000	3.036.2 45.927	2.804.5 98.000			2.625.1 44.000	3.022.4 26.000	2.740.3 29.500			98,8%	99%	97,7 %		
Pembangunan Network Operational Center/Aplikasi			440.00 0.000					438.98 7.100					99,7%				
Sosialisasi sistem informasi			719.47 0.000	1.043.6 00.000	6.775.0 00			697.58 0.000	835.23 0.000	6.775.0 00			96,9%	80%	100 %		
Program Pengembangan Data Center		3.014.5 00					3.014.5 00					100%					
a. Monitoring dan Evaluasi Pengolahan Data Elektronik		3.014.5 00					3.014.5 00					100%					
Program Sosialisasi ketentuan di Bidang Cukai					500.00 0.000												
Penyebaran informasi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang cukai dan wabah penyakit menular pada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan					500.00 0.000												

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kominfo

Tantangan Pelayanan Dinas Kominfo :

- a. Tuntutan keterbukaan informasi publik dan kebutuhan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, murah dan sederhana
- b. Pesatnya perkembangan TIK dan pemerataan infrastruktur TIK
- c. Tuntutan Transformasi digitalisasi pelayanan publik
- d. Tuntutan ketersediaan data statistik sektoral yang terintegrasi melalui *Single Data System*
- e. Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pemanfaatan persandian dan peningkatan kualitas keamanan informasi sesuai standarisasi BSSN

Peluang Pelayanan Dinas Kominfo :

- a. Era keterbukaan yang mendorong kinerja perangkat daerah lebih optimal
- b. Reformasi dan digitalisasi tata kelola pemerintahan sebagai program prioritas dan isu strategis pemerintah daerah
- c. Kesadaran masyarakat akan pentingnya statistik sektoral, informasi dan komunikasi

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Saat ini yang menjadi permasalahan dan isu-isu strategis daerah Kabupaten Kediri yang dituangkan dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 adalah :

- 1) Jumlah aplikasi e-Government yang berfungsi baik menurun.

Berdasarkan hasil pemantauan aplikasi e-Government didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1 Jumlah Aplikasi e-Government

NO	TAHUN	JUMLAH APLIKASI	JUMLAH APLIKASI KONDISI BAIK	JUMLAH APLIKASI KONDISI PERBAIKAN
1	2021	107	81	26
2	2020	101	100	1
3	2019	101	100	1
4	2018	99	34	65

Dari Tabel di atas terlihat jumlah aplikasi yang berfungsi baik mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena sejumlah aplikasi yang umumnya berupa website SKPD sedang dilakukan pemeliharaan dan perbaikan. Pada umumnya beberapa aplikasi tersebut mengalami serangan siber baik virus ataupun malware sehingga harus disuspend dulu untuk dilakukan analisa dan perbaikan. Selanjutnya pengembangan aplikasi eGovernment dilaksanakan sesuai dengan Road Map yang ada pada Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kediri yang dibuat pada tahun 2019 dan dievaluasi untuk setiap tahun menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

- 2) Belum optimalnya pelayanan informasi komunikasi publik yang ditandai dengan masih rendahnya nilai indeks kategori PPID beberapa tahun, yaitu nilai kategori “E”

Tabel 3.2 Pemetaan Permasalahan

NO.	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Keterbukaan Informasi Publik yang belum maksimal	Kesiapan lembaga-lembaga pemerintah dalam implementasi keterbukaan informasi public.	Kultur atau mindset para penyelenggara atau aparatur lembaga public yang sudah terbiasa tertutup.
2.	Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik belum optimal.	Keterbatasan akses internet	Operasional pemerintahan belum disederhanakan
3.	Belum adanya ketersediaan data statistik sektoral yang terintegrasi melalui Single Data System	Perbedaan data antara lembaga pemerintah	Penghimpun data tidak hanya dilakukan oleh BPS, tetapi lembaga pemerintah yang lain

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kediri Terpilih 2021-2026 adalah : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Birokrasi yang Melayani”. Yang dijabarkan melalui misi pembangunan sebagai berikut :

- 1) Pengembangan Sumber daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius
- 2) Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
- 3) Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah

- 4) Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan
- 5) Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah
- 6) Optimalisasi Kepariwisata berbasis Kearifan Lokal
- 7) Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber daya Alam dan Mitigasi Bencana
- 8) Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda
- 9) Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat

Untuk mencapai visi misi tersebut, Kabupaten Kediri merumuskan 7 program prioritas yaitu :

- 1) Pembangunan ekonomi : Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Pertanian, UMKM, Koperasi, dan Pariwisata
- 2) Pembangunan Konektivitas : Pembangunan Konektivitas Antar Wilayah
- 3) Pembangunan Sumber Daya Manusia : Peningkatan kualitas Pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan
- 4) Pembangunan Karakter : Revolusi mental dan nilai-nilai kearifan lokal
- 5) Pembangunan Infrastruktur : Peningkatan infrastruktur pada Pusat Produksi, Pusat Distribusi, dan Pelayanan dasar
- 6) Pembangunan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana : Peningkatan Ketahanan Bencana dan Pelestarian Lingkungan Hidup
- 7) Peningkatan Stabilitas Daerah dan Pelayanan Publik : Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelayanan Publik melalui Pemerintahan yang profesional

Relevansi dan korelasi tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo Kabupaten Kediri dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih terletak pada Misi ke-2, yaitu “Reformasi birokrasi dan pelayanan publik” yang bertujuan untuk “Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik”.

Sebagai tindak lanjut visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Dinas Kominfo mempunyai tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan sasaran Kabupaten Kediri, yaitu “Transformasi Digital Penyelenggaraan Pelayanan publik”. Meskipun demikian, Dinas Kominfo merupakan SKPD yang mendukung semua kinerja dan program pemerintah khususnya terkait dengan dukungan TI dan layanan informasi publikasi.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Kediri terhadap telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Penyusunan perencanaan Dinas Kominfo mengacu pada kebijakan Nasional maupun Provinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun Provinsi.

Berikut tabel kesesuaian prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan daerah yang terkait dengan tupoksi Dinas Kominfo :

Tabel 3.3 Kesesuaian Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Daerah yang terkait dengan Tupoksi Dinas Kominfo

No.	Kesesuaian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas
1.	Pembangunan Ekonomi	
	<p>Prioritas Nasional: Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan</p> <p>Prioritas Provinsi: Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata</p> <p>Prioritas Kabupaten Kediri: Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Pertanian, UMKM, Koperasi, dan Pariwisata</p>	<p>Peningkatan Investasi dan Daya Saing Produk Unggulan Berbasis Sumber Daya Lokal dan Penggunaan teknologi informasi dan pemanfaatan <i>Artificial Intelligence (AI)</i>;</p>
2.	Peningkatan Stabilitas Daerah dan Pelayanan Publik	
	<p>Prioritas Nasional: Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</p> <p>Prioritas Provinsi: Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur</p> <p>Prioritas Kabupaten Kediri: Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelayanan Publik melalui Pemerintahan yang Profesional</p>	<p>Reformasi Birokrasi melalui 8 Area Perubahan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; 2. Penataan dan Penguatan Organisasi; 3. Manajemen Perubahan dengan Mengubah Pola Komunikasi Pemimpin-Rakyat; 4. Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Aparatur; 5. Akuntabilitas Kinerja; 6. Peraturan Perundang-Undangan; 7. Tatalaksana; dan 8. Penguatan Pengawasan dengan Pengembangan <i>E-government (planning, budgeting, procurement, auditing, controlling, evaluating)</i>

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 merujuk kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030. Perencanaan yang disusun mengikuti rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah yang telah ditetapkan. Ketaatan pelaksanaan pembangunan sesuai RTRW diharapkan akan menciptakan pemerataan pembangunan di Kabupaten Kediri. Sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan, struktur ruang wilayah Kabupaten Kediri terdiri dari:

- a. Rencana sistem pusat kegiatan meliputi pusat kegiatan, peran pusat kegiatan, dan perwilayahan.
- b. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah meliputi rencana sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya.

Sebagai SKPD yang ikut melaksanakan misi Kabupaten Kediri yang ke-2 maka keterkaitan tupoksi Dinas Kominfo dengan kajian RTRW bisa ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.4 Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026 dengan RTRW Kabupaten Kediri 2010-2030 yang terkait dengan Dinas Kominfo

Misi RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026	RTRW Kabupaten Kediri 2010-2030
Misi 2 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Pasal 6 ayat 6 Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat, serta pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f

Sedangkan keterkaitan Dinas Kominfo terhadap kajian Lingkungan Hidup RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026 bisa dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.5 Keterkaitan Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026 dengan Misi RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026 yang terkait dengan Dinas Kominfo

Isu Strategis KLHS RPJMD Kab. Kediri 2021-2026	Misi RPJMD Kab. Kediri 2021- 2026
Pentingnya Peningkatan Pelayanan Publik dan Kualitas Aparatur;	Misi 2 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Tantangan dalam Peningkatan PAD, Menyediakan Alternatif Pembiayaan, dan Pengelolaan Belanja Daerah	
Optimalisasi Registrasi Administrasi Kependudukan.	

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan telaah pada kondisi daerah, telaah aspek keuangan daerah, telaah isu internasional, isu nasional, telaah SDGs, isu regional Provinsi Jawa Timur, dan telaah Dokumen Perencanaan Terkait (RPJPD, RTRW, KLHS), Kabupaten Kediri merumuskan beberapa isu strategis. Salah satu isu strategis Kabupaten Kediri yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Kominfo adalah **“Reformasi dan digitalisasi tata kelola pemerintahan.”** Isu ini juga menjadi salah satu elemen yang mendukung kuat kesuksesan pembangunan di Kabupaten Kediri selama lima tahun mendatang.

Reformasi tata kelola pemerintahan dapat diartikan sebagai upaya pembaharuan dan perubahan yang mendasar dalam tata kelola pemerintahan serta sistem penyelenggaraannya. Tujuan reformasi tersebut adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan akuntabel serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas. Pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan akan menyingkirkan ego sektoral setiap pihak sehingga terwujud kolaborasi kerja lintas OPD dalam mencapai tujuan dari pembangunan yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra hingga RPJMD.

Isu reformasi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kediri, antara lain:

- Perlunya Percepatan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan pemutakhiran infrastruktur IT

Perubahan global yang saat ini terjadi menuntut transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih cepat dan efisien. Seiring dengan pesatnya laju perkembangan teknologi, tata kelola pemerintahan dituntut untuk segera berbenah dengan berbagai layanan digital. Digitalisasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta menjangkau masyarakat secara lebih luas. Sektor pelayanan publik yang perlu dioptimalkan melalui digitalisasi diantaranya:

- Layanan informasi dan pengaduan publik;
- Kependudukan;
- Fasilitas kesehatan;
- Pendapatan;
- Perijinan;
- Kepegawaian

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kominfo

Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik, Dinas Kominfo Kabupaten Kediri mengemban Visi Bupati Tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan ekonomi Kerakyatan yang didukung Birokrasi yang Melayani”, dan menjalankan misi Bupati Kediri yang ke 2 yakni “Reformasi birokrasi dan pelayanan publik”.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, tujuan yang hendak dicapai oleh Kabupaten Kediri adalah “Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik”, dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi. Sedangkan tujuan Dinas Kominfo adalah sasaran Kabupaten Kediri dalam Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik yaitu “Transformasi Digital Penyelenggaraan Pelayanan publik” dengan indikator sasaran Indeks SPBE . Sedangkan sasaran Dinas Kominfo adalah Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik dengan indikator Indeks kategori PPID.

Berikut tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Kominfo berdasarkan RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kominfo 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik		Indeks SPBE	3,88	4,04	4,28	4,52	4,76	5,00
2.		Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik	Indeks Kategori PPID	E	D	C	C	B	A

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kominfo diperlukan strategi dan arah kebijakan. Berdasarkan RPJMD 2021-2026, rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah beserta strategi dan arah kebijakan Dinas Kominfo Kabupaten Kediri dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kominfo

Misi 2: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik	Digitalisasi birokrasi, informasi dan layanan publik	Penyiapan <i>roadmap</i> dan <i>masterplan</i> digitalisasi birokrasi, informasi, dan layanan publik
			Pengembangan <i>e-government</i>
			Penerapan Tata Naskah Dinas Elektronik
			Pengembangan <i>Smart-Pertanian</i> melalui program Desa Inovasi Tani Organik (DITO)
			Pengembangan ekonomi digital (<i>e-commerce</i>)
			Menyediakan pelayanan cerdas menggunakan teknologi informasi berbasis <i>Big Data</i> , <i>Artificial Intelligence</i> , <i>Robotics</i> , <i>Cloud Computing</i> sehingga masyarakat bisa melayani dirinya sendiri dari rumah
			Pengembangan, pengintegrasian, dan pemanfaatan interoperabilitas sistem informasi dalam satu <i>big data</i>
			Penyediaan infrastruktur pendukung layanan teknologi informatika

			<p>Pengembangan aplikasi pendukung layanan publik, informasi, promosi potensi daerah, pariwisata, dan aktivitas penunjang masyarakat lainnya</p>
			<p>Penguatan komunikasi informasi publik melalui media sosial, media tatap muka, dan radio</p>
			<p>Pengembangan komunikasi tematik melalui program NGOPI (Ngobrol Persoalan dan Solusi)</p>
			<p>Kerjasama dan penguatan jejaring komunikasi media masa, komunitas, dan kelompok informasi masyarakat</p>
			<p>Peningkatan kualitas dan kuantitas inovasi pelayanan publik</p>
			<p>Inovasi pelayanan publik jemput bola</p>
			<p>Penguatan jejaring komunikasi persandian daerah</p>
			<p>Peningkatan tertib administrasi arsip dan pelayanan publik</p>
			<p>Penyediaan Mall Pelayanan di kecamatan atau desa</p>
			<p>Mendorong intensitas komunikasi pemberi pelayanan kepada pengguna layanan untuk selalu melakukan perbaikan layanan guna meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat</p>
			<p>Peningkatan komunikasi dan informasi publik NGOPI (Ngobrol Persoalan dan Solusi)</p>
			<p>Penyediaan mobil siaga</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Kediri sebagai penjabaran misi yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- f. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

B. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
- b. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
- c. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- d. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- e. Pelayanan Informasi Publik
- f. Layanan Hubungan Media
- g. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah

- h. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

C. Program Aplikasi Informatika

1. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota
- b. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2. Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
- b. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah daerah
- c. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- d. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
- e. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
- f. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
- g. Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
- h. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

D. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
- b. Membangun Metadata Statistik Sektoral

E. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

**1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Pagu indikatif dan sumber pendanaan program - kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kominfo Kabupaten Kediri 5 (lima) tahun kedepan (2021 – 2026) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kominfo Kabupaten Kediri dalam lima tahun mendatang, data tersaji pada tabel 6.1. dibawah ini:

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Misi 2 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik																
	Sasaran 2.1.3 : Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks SPBE	3,56	3,88	9.755.089.050	4,04	12.474.914.605	4,28	12.915.295.000	4,52	13.369.786.000	4,76	14.183.044.000	5,00	15.060.157.000	5,00	77.758.285.655
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan layanan informasi komunikasi dan pengaduan	100	100%	6.473.117.000,00	100%	6.781.683.000,00	100%	7.105.677.000,00	100%	7.445.871.000,00	100%	7.803.075.000,00	100%	8.178.138.000,00	100%	43.787.561.000,00
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah	100	100%	3.246.470.300,00	100%	5.303.231.605,00	100%	5.479.618.000,00	100%	5.593.915.000,00	100%	6.049.969.000,00	100%	6.552.019.000,00	100%	32.225.222.905,00

Lampiran Matriks Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Kediri 2021-2026 (kegiatan sub kegiatan)

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik				Indeks SPBE	3.56	3.88		4.04		4.28		4.52		4.76		5.00			
	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik			Indeks Kategori PPID	E	E		D		C		C		B		A			
		02.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	9.686.233.038	100%	8.119.040.651	100%	6.853.546.000	100%	6.642.953.000	100%	6.733.929.000	100%	7.747.304.000		
		2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	30 unit	30 unit	164.821.000	30 unit	134.970.000	30 unit	67.485.000								
		2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	14 unit	14 unit	93.421.000	14 unit	60.000.000	14 unit	30.000.000								
		2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	16 peralatan/mesin	16 peralatan/mesin	71.400.000	16 peralatan/mesin	74.970.000	16 peralatan/mesin	37.485.000								
		2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	12 bulan	12 bulan	396.575.000	12 bulan	416.279.500	12 bulan	522.400.000								
		2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	12 bulan	2.400.000	12 bulan	2.400.000	12 bulan	2.400.000	12 bulan	2.400.000	12 bulan	2.400.000	12 bulan	2.400.000		
		2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	394.175.000	12 bulan	413.879.500	12 bulan	520.000.000								
		2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen	4 dokumen	4.240.000	4 dokumen	4.601.875										
		2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1 laporan	970.000	1 laporan	1.030.875										
		2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	3.270.000	3 dokumen	3.571.000										
		2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	30 dokumen	30 dokumen	274.871.950	30 dokumen	265.824.730										
		2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 barang cetakan/penggandaan	4 barang cetakan/penggandaan	35.022.000	4 barang cetakan/penggandaan	36.772.825										
		2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 bahan	4 bahan	21.660.000	4 bahan	22.995.000										
		2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	20 rapat koordinasi/konsultasi	20 rapat koordinasi/konsultasi	121.819.000	20 rapat koordinasi/konsultasi	104.700.000										
		2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	4 komponen	4 komponen	5.805.750	4 komponen	6.095.400										
		2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 peralatan	4 peralatan	16.550.400	4 peralatan	17.547.990										
		2.16.01+C26:S3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	4 bahan	4 bahan	32.325.000	4 bahan	33.940.315										
		2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 peralatan/perengkapan	4 peralatan/perengkapan	41.689.800	4 peralatan/perengkapan	43.773.200										

		2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	113.200.000	2 dokumen	118.200.000								
		2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada SKPD	12 laporan	12 laporan	13.200.000										
		2.16.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah (BMD) SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	105.000.000								
		2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	20 dokumen	20 dokumen	8.732.525.088	20 dokumen	7.179.164.546	20 dokumen	5.981.154.895	20 dokumen	5.770.561.895	20 dokumen	5.861.537.895	20 dokumen	6.768.792.395
		2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah dokumen pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	56.760.000	12 dokumen	448.360.000								
		2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu administrasi pelaksanaan tugas ASN	13 bulan	13 bulan	1.308.420.000	13 bulan	1.076.400.000								
		2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	14 laporan	14 laporan	1.280.000	14 laporan	1.344.000								
		2.16.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran	2 laporan	2 laporan	475.000	2 laporan	497.875								
		2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1.450.000	1 laporan	1.522.000								
		2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	7.364.140.088	14 bulan	5.651.040.671	14 bulan	4.453.031.020	14 bulan	4.242.438.020	14 bulan	4.333.414.020	14 bulan	5.240.668.520
					50%	60%		70%		80%		85%		90%		100%	
		02:20:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Ketersediaan Statistik Sektoral di lingkup Daerah	Ada	Ada	79.864.200	Ada	238.999.730	Ada	275.810.000	Ada	267.335.000	Ada	270.996.000	Ada	219.808.000
		2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah	1 paket data statistik sektoral	1 paket data statistik sektoral	79.864.200	1 paket data statistik sektoral	238.999.730	1 paket data statistik sektoral	275.810.000	1 paket data statistik sektoral	267.335.000	1 paket data statistik sektoral	270.996.000	1 paket data statistik sektoral	219.808.000
		2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	1 kegiatan	1 kegiatan	74.955.800	1 kegiatan	149.999.855								
		2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah koordinasi perihal membangun metadata statistik sektoral	2 kegiatan	2 kegiatan	4.908.400	2 kegiatan	88.999.875	2 kegiatan	125.810.145	2 kegiatan	117.335.145	2 kegiatan	120.996.145	2 kegiatan	69.808.145
													80%		100%		
		02:16:02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik		100%	6.473.117.000	100%	5.089.226.525	100%	4.954.195.000	100%	5.175.168.000	100%	5.246.043.000	100%	4.680.562.000
		2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi yang terkelola	785 konten	825 konten	6.473.117.000	850 konten	5.089.226.525	875 konten	4.954.195.000	900 konten	5.175.168.000	925 konten	5.246.043.000	950 konten	4.680.562.000
		2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah peserta Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	60 orang	60 orang	45.982.000	60 orang	46.335.450								
		2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah peserta Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	80 orang	80 orang	43.430.000	80 orang	44.496.500								
		2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten yang dikelola	785 konten	825 konten	85.000.000	850 konten	85.000.000	875 konten	85.000.000	900 konten	85.000.000	925 konten	85.000.000	950 konten	85.000.000
		2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah pembinaan kelompok informasi masyarakat dan jaringan komunikasi	4 kegiatan	6 kegiatan	558.185.000	6 kegiatan	84.934.175								

		2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah kerja sama dengan media elektronik dan portal online	37 media elektronik dan portal online	40 media elektronik dan portal online	2.850.000.000	40 media elektronik dan portal online	2.464.464.650	40 media elektronik dan portal online	2.364.464.650	45 media elektronik dan portal online	2.464.464.650	45 media elektronik dan portal online	2.494.464.650	45 media elektronik dan portal online	2.164.464.650	
		2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah kerja sama dengan media cetak	42 media cetak	45 media cetak	2.759.890.000	45 media cetak	2.230.354.650	45 media cetak	2.195.323.125	50 media cetak	2.316.296.125	50 media cetak	2.357.171.125	50 media cetak	2.121.690.125	
		2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah peserta pelatihan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	80 orang	80 orang	41.600.000	80 orang	42.686.600									
		2.16.02.2.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah peserta pelatihan SDM dan Sinkronisasi PPID	170 orang	170 orang	56.630.000	170 orang	57.408.000									
		2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah peserta Bakoimas	130 orang	130 orang	32.400.000	130 orang	33.546.500									
		02:16:03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah			3.246.470.300	100%	4.453.145.500	100%	4.844.444.000	100%	5.050.455.000	100%	5.071.111.000	100%	4.882.836.000	
		2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nama Domain dan Sub Domain di lingkup Pemerintah daerah yang terkelola				150 domain/sub domain	58.415.000	200 domain/sub domain	58.415.000	250 domain/sub domain	58.415.000	300 domain/sub domain	58.415.000	350 domain/sub domain	58.415.000	
		2.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Nama Domain/Sub Domain yang terdaftar			4.055.000	150 domain/sub domain	4.055.000	200 domain/sub domain	4.055.000	250 domain/sub domain	4.055.000	300 domain/sub domain	4.055.000	350 domain/sub domain	4.055.000	
		2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nama Domain/Sub Domain yang terpelihara			54.360.000	100 domain/sub domain	54.360.000	200 domain/sub domain	54.360.000	250 domain/sub domain	54.360.000	300 domain/sub domain	54.360.000	350 domain/sub domain	54.360.000	
		2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem informasi pemerintah daerah yang terkelola	170 sistem informasi	170 sistem informasi	3.246.470.300	170 sistem informasi	4.394.730.500	170 sistem informasi	4.786.029.000	170 sistem informasi	4.992.040.000	170 sistem informasi	5.012.696.000	170 sistem informasi	4.824.421.000	
		2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi SPBE Kabupaten Kediri	1 kegiatan	1 kegiatan	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Uptime layanan Pusat Data untuk SKPD Kabupaten Kediri	95%	95%	2.790.675.400	95%	3.149.999.900	95%	3.541.298.400	95%	3.747.309.400	95%	3.767.965.400	95%	3.579.690.400	
		2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah virtual meeting yang menggunakan fasilitas jaringan intra pemerintah	-	-	-	125 kegiatan	38.250.000									
		2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan	1 aplikasi	1 aplikasi	69.989.000	17 aplikasi	309.999.000	17 aplikasi	309.999.000	19 aplikasi	309.999.000	21 aplikasi	309.999.000	23 aplikasi	309.999.000	
		2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Prosentase aplikasi terintegrasi SPBE Kabupaten Kediri	-	-	-	15%	100.000.000	20%	100.000.000	25%	100.000.000	30%	100.000.000	35%	100.000.000	
		2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah aparat/masyarakat yang mengikuti pelatihan TI	70 aparat, 80 masyarakat	70 aparat, 80 masyarakat	122.881.100	70 aparat, 80 masyarakat	75.539.600									
		2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah infrastruktur teknologi informasi yang terpelihara baik	6 paket	6 paket	237.924.800	6 paket	422.942.000	6 pake	422.942.000							
		2.16.03.2.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah dokumen arsitektur SPBE	-	-	-	1 pake dokumen arsitektur SPBE	177.750.000									
		2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi SPBE Kabupaten Kediri	-	-	-	1 kegiatan	120.250.000									
		02:21:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Cakupan Keamanan persandian dan TI	100%	100%	688.492.800	100%	89.276.725	100%	544.828.000	100%	528.087.000	100%	535.319.000	100%	523.908.000	

	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Jumlah informasi sandi dan untuk Pengamanan Informasi sistem informasi yang aman Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1 paket	1 paket	688.492.800	1 paket	89.276.725	1 paket	544.828.000	1 paket	528.087.000	1 paket	535.319.000	1 paket	523.908.000
	2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Berbasis Elektronik dan Non Elektronik yang aman	1 paket	1 paket	688.492.800	1 paket	89.276.725	1 paket	544.828.000	1 paket	528.087.000	1 paket	535.319.000	1 paket	523.908.000
	TOTAL					20.174.177.338		17.989.689.131		17.472.823.000		17.663.998.000		17.857.398.000		18.054.418.000

Kediri, 24 September 2021
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kabupaten Kediri



IBNU IMAD, S.Sos
NIP. 19721010 200501 1 014

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Adapun indikator kinerja Dinas Kominfo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Kominfo yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun Indikator						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Indeks SPBE	3,56	3,88	4,04	4,28	4,52	4,76	5,00	5,00
2.	Indeks Kategori PPID	E	E	D	C	C	B	A	A

BAB VIII

PENUTUP

Dinas Kominfo Kabupaten Kediri memiliki peranan yang besar dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kediri khususnya dalam “Reformasi birokrasi dan pelayanan publik”. Dinas Kominfo merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui Transformasi Digital Penyelenggaraan Pelayanan publik.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian Kabupaten Kediri merupakan uraian dari rencana strategis pelaksanaan arah dan kebijakan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 serta merupakan kebijakan Dinas Kominfo yang didasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi yang selaras dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2021 – 2026 merupakan pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan dari Dinas Kominfo Kabupaten Kediri selama 5 tahun kedepan. Selain itu Renstra merupakan pedoman dalam mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan maupun lima tahunan. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan akan sangat ditentukan oleh seluruh jajaran perangkat daerah dan partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan demikian diharapkan program dan kegiatan berdasarkan isu-isu strategis dalam 5 (lima) tahun mendatang dapat dilaksanakan sesuai rencana kerja.

BUPATI KEDIRI

**HANINDHITO HIMAWAN
PRAMANA**